

## PERAN PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN DALAM MENGATASI PENGARUH MONEY POLITIC TERHADAP CALON LEGISLATIF DPRD TINGKAT KOTA/KABUPATEN di MEDAN TEMBUNG

Mangido Nainggolan<sup>1</sup>, Edyma Tamba<sup>2</sup>, Johannes Triputra Simanjuntak<sup>3</sup>, Cici Indra  
Wayu<sup>4</sup>, Irvan Lumban Gaol<sup>5</sup>, Adly Khalisa<sup>6</sup>  
[golanbatuara71@gmail.com](mailto:golanbatuara71@gmail.com)<sup>1</sup>, [edymatamba258@gmail.com](mailto:edymatamba258@gmail.com)<sup>2</sup>, [johanesjuntak493@gmail.com](mailto:johanesjuntak493@gmail.com)<sup>3</sup>,  
[ciciindrawayu@gmail.com](mailto:ciciindrawayu@gmail.com)<sup>4</sup>, [lumbangaolirvan798@gmail.com](mailto:lumbangaolirvan798@gmail.com)<sup>5</sup>, [adlykhalisha@gmail.com](mailto:adlykhalisha@gmail.com)<sup>6</sup>  
Universitas Negeri Medan

### ABSTRAK

Politik uang merupakan fenomena yang telah lama menghiasi proses politik di Indonesia, termasuk dalam konteks pemilihan umum di tingkat lokal seperti di Medan Tembung. Praktik ini tidak hanya melanggar aturan hukum yang ada, tetapi juga mengancam integritas demokrasi dan representasi politik yang sehat. Penelitian ini bertujuan untuk mendalami pengaruh money politic terhadap proses pemilihan calon legislatif DPRD di Medan Tembung melalui pendekatan analisis dokumen. Metode ini memungkinkan eksplorasi mendalam terhadap pola penggunaan dan dampak money politic, serta persepsi masyarakat terhadap praktik ini. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih dalam tentang bagaimana money politic mempengaruhi dinamika politik lokal dan implikasi jangka panjangnya terhadap sistem politik Indonesia. Kesimpulan dari penelitian ini mengindikasikan perlunya langkah-langkah pencegahan yang lebih kuat, reformasi sistem pembiayaan kampanye, peningkatan kesadaran publik, serta penguatan lembaga pengawas dan penegakan hukum untuk mengatasi tantangan money politic secara efektif. **Kata Kunci:** politik uang, proses pemilu, calon legislatif, Medan Tembung, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), analisis dokumen, Indonesia.

### ABSTRACT

*oney politics has long been a prevalent phenomenon in Indonesian political processes, including at the local level such as in Medan Tembung during elections. This practice not only violates existing legal norms but also threatens the integrity of democracy and healthy political representation. This research aims to delve into the influence of money politics on the electoral process of legislative candidates for the Medan Tembung Regional Representative Council (DPRD) through a document analysis approach. This method allows for an in-depth exploration of the patterns of use and impacts of money politics, as well as public perceptions of these practices. The findings of this study are expected to provide deeper insights into how money politics affects local political dynamics and its long-term implications for Indonesia's political system. The conclusions drawn indicate the need for stronger preventive measures, campaign finance reform, increased public awareness, and strengthened oversight institutions and law enforcement to effectively address the challenges posed by money politics.*

**Keywords:** money politics, electoral process, legislative candidates, Medan Tembung, Regional Representative Council (DPRD), document analysis, Indonesia.

### PENDAHULUAN

Indonesia, dengan segala keberagaman suku, budaya, bahasa, dan adat istiadatnya, memerlukan sistem politik yang mampu menyatukan pluralitas ini. Saat ini, Indonesia menganut sistem politik Demokrasi Pancasila. Demokrasi memungkinkan partisipasi warga negara baik secara langsung maupun melalui perwakilan dalam proses perumusan, pengembangan, dan pembuatan hukum. Demokrasi juga mencakup kondisi sosial,

ekonomi, dan budaya yang mendukung kebebasan politik yang adil dan setara bagi semua warga negara.

Pemilihan umum di Indonesia, sebagai negara demokrasi yang berkembang, sering kali diwarnai oleh berbagai tantangan, termasuk praktik money politic yang meresahkan. Money politic merujuk pada praktik penggunaan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi hasil pemilihan. Fenomena ini tidak hanya mengancam integritas proses demokrasi tetapi juga mempengaruhi kualitas representasi politik dan keadilan dalam sistem politik. Medan Tembung, sebagai bagian dari kota/kabupaten di Indonesia, tidak luput dari praktik ini, dengan calon legislatif DPRD di tingkat kota/kabupaten menjadi subjek utama dari penelitian ini.

Money politic telah menjadi topik yang penting dalam konteks politik Indonesia karena dampaknya yang merugikan terhadap demokrasi yang sehat dan representasi yang adil. Meskipun dilarang secara hukum, praktik ini masih tersebar luas di berbagai tingkatan pemilihan, termasuk pada tingkat DPRD. Medan Tembung, dengan populasi dan dinamika sosial-ekonomi yang unik, memberikan konteks yang menarik untuk memahami bagaimana money politic beroperasi dan bagaimana dampaknya terhadap dinamika politik lokal.

Penelitian ini bertujuan untuk mendalami pengaruh money politic terhadap proses pemilihan calon legislatif DPRD di Medan Tembung secara lebih mendalam. Analisis akan dilakukan untuk mengeksplorasi sejauh mana money politic mempengaruhi hasil pemilihan, bagaimana pola penggunaannya, serta persepsi masyarakat terhadap praktik ini. Melalui pendekatan kualitatif dengan studi kasus, diharapkan penelitian ini dapat memberikan wawasan yang lebih dalam tentang fenomena tersebut.

Dalam konteks Medan Tembung, dinamika politik lokal sangat dipengaruhi oleh faktor ekonomi dan sosial. Praktik money politic dapat menjadi strategi yang menarik bagi calon legislatif untuk mendapatkan dukungan politik dan kemenangan dalam pemilihan. Namun, dampak jangka panjangnya terhadap stabilitas politik dan kualitas representasi masyarakat perlu dievaluasi secara kritis.

Pengaruh money politic tidak hanya terbatas pada proses kampanye atau hasil pemilihan, tetapi juga dapat merusak integritas lembaga legislatif setelah terpilih. Ini memunculkan pertanyaan penting tentang etika politik, akuntabilitas publik, dan kepercayaan masyarakat terhadap sistem politik secara keseluruhan. Oleh karena itu, penelitian ini tidak hanya akan menyoroti dampak praktik ini terhadap pemilihan umum tetapi juga menggali implikasi jangka panjangnya bagi tatanan politik lokal.

Keterlibatan masyarakat dalam pemilu di Medan Tembung juga menjadi aspek penting yang perlu dianalisis. Seberapa jauh pemilih terpengaruh oleh money politic dalam menentukan pilihannya? Bagaimana persepsi mereka terhadap calon yang didukung oleh praktik ini? Pertanyaan-pertanyaan ini akan membantu dalam memahami dinamika politik lokal dan bagaimana praktik money politic dapat mengubah cara pemilih berpartisipasi dalam proses demokrasi.

Penelitian sebelumnya telah menunjukkan bahwa money politic dapat menggeser fokus dari platform kebijakan dan kapabilitas kandidat menjadi upaya memenangkan kekuasaan dengan cara yang tidak selalu transparan dan adil. Ini mempertanyakan esensi demokrasi representatif di mana kepentingan masyarakat seharusnya didahulukan di atas segalanya.

## **METODOLOGI PENELITIAN**

Metode penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah analisis dokumen atau studi pustaka yang mendalam. Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan peneliti untuk mengumpulkan, meninjau, dan menganalisis berbagai literatur dan dokumen yang relevan terkait dengan pengaruh money politic terhadap calon legislatif DPRD di Medan Tembung. Data sekunder yang dikumpulkan termasuk literatur akademik, laporan penelitian sebelumnya, artikel jurnal, buku-buku teks, serta dokumen resmi seperti laporan keuangan kampanye dan dokumen peraturan terkait pemilihan umum.

Proses analisis akan dimulai dengan pencarian dan seleksi literatur yang komprehensif yang mencakup berbagai sudut pandang tentang money politic. Ini meliputi studi tentang strategi kampanye yang melibatkan penggunaan uang dalam proses politik, analisis dampaknya terhadap transparansi politik, integritas pemilihan, dan partisipasi masyarakat dalam proses demokrasi. Dokumen-dokumen tersebut akan dianalisis secara sistematis untuk mengidentifikasi pola-pola, tren, dan temuan penting yang terkait dengan praktik money politic di Indonesia, khususnya di Medan Tembung.

Metode ini juga mencakup evaluasi kritis terhadap keandalan dan validitas data sekunder yang digunakan. Hal ini penting untuk memastikan bahwa literatur yang dipilih adalah relevan, dapat dipercaya, dan mampu memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pemahaman tentang fenomena money politic dalam konteks lokal. Penelitian ini tidak hanya bertujuan untuk mendokumentasikan praktik money politic tetapi juga untuk mengembangkan pemahaman yang lebih dalam tentang implikasi sosial, politik, dan ekonomi dari fenomena tersebut.

Secara keseluruhan, dengan memanfaatkan analisis dokumen atau studi pustaka, studi ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang mendalam dan terperinci tentang bagaimana money politic mempengaruhi proses pemilihan dan representasi politik di tingkat DPRD Medan Tembung. Metode ini juga mendukung upaya untuk mengidentifikasi potensi solusi kebijakan yang dapat meningkatkan integritas demokrasi lokal dan meminimalkan dampak negatif dari praktik money politic dalam sistem politik Indonesia.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Definisi Money Politic**

Money politic merujuk pada praktik penggunaan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi hasil pemilihan politik. Praktik ini sering kali melibatkan pemberian uang kepada pemilih atau pendukung, pengeluaran besar untuk kampanye yang tidak transparan, atau pemanfaatan sumber daya ekonomi untuk memperoleh keuntungan politik.

### **Teori-Teori**

#### **1. Teori Demokrasi dan Integritas Pemilu**

Demokrasi merupakan sistem pemerintahan di mana kekuasaan berada di tangan rakyat. Dalam konteks ini, pemilihan umum (pemilu) adalah mekanisme utama yang memungkinkan partisipasi rakyat dalam menentukan pemimpin dan pembuat kebijakan. Menurut teori demokrasi, pemilu harus dilaksanakan secara bebas, adil, dan transparan agar dapat mencerminkan kehendak rakyat yang sebenarnya. Integritas pemilu sangat penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap sistem demokrasi. Politik uang merupakan ancaman serius terhadap integritas pemilu karena mengganggu prinsip keadilan dan kebebasan dalam pemilihan.

#### **2. Teori Ekonomi Politik**

Teori ekonomi politik menjelaskan interaksi antara ekonomi dan politik dalam masyarakat. Dalam konteks politik uang, teori ini dapat digunakan untuk memahami bagaimana distribusi sumber daya ekonomi mempengaruhi proses politik. Politik uang sering terjadi di wilayah dengan kesenjangan ekonomi yang tinggi, di mana kandidat dengan sumber daya finansial yang besar memiliki keunggulan dibandingkan dengan yang lain. Dengan menawarkan uang atau barang berharga, calon legislatif berusaha memanfaatkan kondisi ekonomi masyarakat untuk mendapatkan dukungan politik.

### 3. Teori Ketergantungan dan Modernisasi

Teori ketergantungan berargumen bahwa praktik-praktik seperti politik uang lebih umum terjadi di negara-negara berkembang atau wilayah dengan tingkat pembangunan yang rendah. Di sisi lain, teori modernisasi menyatakan bahwa dengan meningkatnya tingkat pendidikan dan pembangunan ekonomi, masyarakat akan menjadi lebih rasional dan kritis terhadap praktik-praktik koruptif, termasuk politik uang. Kedua teori ini membantu memahami dinamika politik uang di Medan Tembung, di mana tingkat pendidikan dan kondisi ekonomi masyarakat dapat mempengaruhi kecenderungan mereka terhadap politik uang.

### 4. Teori Perilaku Pemilih

Teori perilaku pemilih menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan pemilih dalam pemilu. Menurut teori ini, perilaku pemilih dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk latar belakang sosial-ekonomi, pendidikan, nilai-nilai pribadi, dan informasi yang tersedia. Dalam konteks politik uang, teori ini membantu memahami mengapa pemilih mungkin menerima uang atau barang dari calon legislatif dan bagaimana hal itu mempengaruhi pilihan mereka. Misalnya, pemilih yang menghadapi kesulitan ekonomi mungkin lebih rentan terhadap bujukan politik uang dibandingkan dengan pemilih yang lebih makmur dan terdidik.

### 5. Teori Agen dan Prinsipal

Teori agen dan prinsipal (principal-agent theory) menganalisis hubungan antara pihak yang memberi tugas (prinsipal) dan pihak yang menerima tugas (agen). Dalam konteks pemilu, pemilih bertindak sebagai prinsipal yang memberikan mandat kepada calon legislatif (agen) untuk mewakili kepentingan mereka. Politik uang mengganggu hubungan ini karena calon legislatif yang terpilih melalui praktik koruptif mungkin lebih berfokus pada kepentingan pribadi atau kelompok tertentu daripada kepentingan publik yang lebih luas. Teori ini membantu memahami bagaimana politik uang dapat merusak akuntabilitas dan representasi dalam sistem demokrasi.

### 6. Teori Korupsi Politik

Teori korupsi politik menyoroti bagaimana korupsi dapat terjadi dalam berbagai bentuk, termasuk politik uang, dan dampaknya terhadap proses politik dan pemerintahan. Menurut teori ini, korupsi politik muncul ketika individu atau kelompok menggunakan posisi kekuasaan mereka untuk keuntungan pribadi atau kelompok dengan cara yang melanggar hukum atau norma-norma etika. Politik uang merupakan salah satu bentuk korupsi politik yang merusak legitimasi dan efektivitas pemerintahan. Teori ini penting untuk memahami dampak jangka panjang politik uang terhadap kualitas pemerintahan dan kebijakan publik.

### 7. Model Sistem Politik Lokal

Model sistem politik lokal menekankan pentingnya konteks lokal dalam mempengaruhi dinamika politik. Setiap daerah memiliki karakteristik unik, seperti struktur ekonomi, budaya politik, dan tingkat pengawasan terhadap pemilu. Di Medan Tembung, misalnya, struktur sosial-ekonomi dan budaya lokal dapat mempengaruhi prevalensi dan

dampak politik uang. Dengan menggunakan model ini, penelitian dapat lebih memahami bagaimana faktor-faktor lokal khusus mempengaruhi praktik politik uang dan upaya penanggulangannya.

#### 8. Teori Pengawasan dan Penegakan Hukum

Teori pengawasan dan penegakan hukum menekankan pentingnya mekanisme pengawasan yang efektif dan penegakan hukum yang tegas untuk mencegah dan menindak praktik politik uang. Lemahnya pengawasan dan penegakan hukum sering kali menjadi faktor utama yang memungkinkan politik uang terjadi. Teori ini menyoroti kebutuhan akan kerangka hukum yang kuat, institusi yang independen, dan keterlibatan masyarakat dalam memonitor proses pemilu untuk memastikan integritas dan keadilan dalam pemilihan.

#### **Tantangan Money Politic dalam Konteks Indonesia**

Di Indonesia, money politic menjadi tantangan serius dalam menjaga integritas demokrasi. Praktik ini melanggar aturan hukum yang ada, seperti yang diatur dalam Undang-Undang Pemilu dan peraturan lainnya, namun masih tersebar luas di berbagai tingkatan pemilihan.

#### **Variasi dan Konteks Lokal Money Politic**

Money politic dapat bervariasi tergantung pada konteks lokalnya. Di daerah perkotaan seperti Medan Tembung, faktor sosial-ekonomi dan politik lokal memainkan peran penting dalam praktik ini. Calon legislatif sering kali menggunakan strategi ini untuk mendapatkan dukungan politik yang diperlukan untuk memenangkan pemilihan.

##### Dampak Money Politic terhadap Proses Pemilihan

Praktik money politic dapat merusak integritas proses pemilihan umum dengan menggeser fokus dari platform kebijakan dan kapabilitas kandidat. Hal ini mengurangi kualitas representasi politik dan meningkatkan kemungkinan terpilihnya calon yang kurang kompeten atau tidak memiliki integritas yang tinggi.

#### 1. Dampak Jangka Panjang Money Politic

Secara jangka panjang, money politic dapat merusak stabilitas politik dengan mempengaruhi legitimasi lembaga legislatif dan pemerintah yang terpilih. Masyarakat menjadi kurang percaya terhadap representasi politik dan keadilan dalam sistem politik, memperburuk masalah ketidaksetaraan dan ketidakadilan.

#### 2. Persepsi Masyarakat terhadap Money Politic

Pemilih dan masyarakat umumnya memiliki persepsi negatif terhadap money politic, meskipun dalam beberapa kasus, terdapat juga penerimaan terhadap praktik ini sebagai bagian dari politik praktis. Namun, mayoritas melihatnya sebagai penghambat demokrasi yang sehat dan proses pemilihan yang adil.

#### **Solusi untuk Mengatasi Money Politic**

Untuk mengatasi money politic, langkah-langkah pencegahan dan penindakan perlu diperkuat. Penguatan hukum dan penegakan aturan terkait pemilu menjadi krusial. Pengawasan yang ketat dari lembaga-lembaga terkait seperti KPU dan Bawaslu diperlukan untuk memastikan kepatuhan dan transparansi dalam pengeluaran kampanye.

#### **Pendidikan Politik dan Kesadaran Publik**

Pendidikan politik yang lebih baik kepada masyarakat dapat meningkatkan kesadaran akan pentingnya memilih berdasarkan kebijakan dan integritas kandidat, bukan berdasarkan imbalan finansial atau materi lainnya. Masyarakat perlu diberdayakan untuk mengenali dan melaporkan praktik money politic yang merugikan.

#### 1. Peran Media dan Informasi Publik

Media memiliki peran penting dalam mengawasi dan memberitakan praktik money

politic. Media yang independen dan berintegritas dapat membantu meningkatkan transparansi dan memperkuat keterbukaan informasi terkait dengan dana kampanye dan praktik politik.

## 2. Reformasi Sistem Pembiayaan Kampanye

Reformasi mendalam terhadap sistem pembiayaan kampanye juga perlu dipertimbangkan. Membatasi sumber dan jumlah uang yang dapat dihabiskan dalam kampanye, serta mendorong penggunaan dana publik atau donasi terbuka, dapat mengurangi ketergantungan pada praktik money politic.

## 3. Implementasi Sanksi yang Deterrent

Sanksi yang tegas dan efektif perlu diterapkan terhadap pelanggar money politic. Ini termasuk denda yang signifikan, diskualifikasi dari pemilihan, atau tindakan hukum terhadap mereka yang terbukti bersalah. Hukuman yang nyata akan menjadi pelajaran bagi calon dan partai politik untuk tidak terlibat dalam praktik yang merugikan ini.

## **Peran Pemerintah dan Lembaga Pengawas**

Pemerintah pusat dan daerah memiliki tanggung jawab untuk memastikan adanya lingkungan politik yang bersih dan transparan. Kerja sama yang erat antara lembaga-lembaga pengawas seperti KPU, Bawaslu, dan aparat penegak hukum menjadi kunci dalam menghadapi tantangan money politic.

### 1. Dukungan Internasional dan Kerjasama Regional

Kerjasama internasional dan regional dalam membangun kapasitas dan pertukaran informasi tentang pengalaman dalam menghadapi money politic juga dapat memberikan kontribusi yang berarti dalam mengatasi masalah ini.

### 2. Partisipasi Aktif Masyarakat Sipil

Peran masyarakat sipil, termasuk LSM dan kelompok advokasi, penting dalam mengawasi dan melaporkan praktik money politic. Mereka dapat berperan sebagai pengamat independen yang memastikan proses pemilihan berjalan dengan jujur dan adil.

### 3. Evaluasi Regulasi dan Kebijakan Publik

Evaluasi secara berkala terhadap regulasi dan kebijakan publik terkait pemilihan umum perlu dilakukan untuk memastikan relevansi dan efektivitasnya dalam mengatasi money politic. Perubahan yang diperlukan harus disesuaikan dengan dinamika politik dan perkembangan sosial ekonomi masyarakat.

### 4. Dukungan terhadap Pendidikan Hukum dan Etika Politik

Pendidikan hukum dan etika politik yang lebih baik di tingkat pendidikan formal dan non-formal dapat membantu mengurangi praktik money politic dengan meningkatkan pemahaman akan konsekuensi negatifnya terhadap demokrasi dan tatanan sosial.

### 5. Inovasi dalam Teknologi dan Transparansi

Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dapat meningkatkan transparansi dalam dana kampanye dan memfasilitasi partisipasi publik dalam memonitor pengeluaran kampanye secara real-time.

### 6. Penguatan Institusi Demokrasi Lokal

Penguatan lembaga-lembaga demokrasi lokal, termasuk dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD) dan kepala daerah, perlu mendapat perhatian khusus dalam menjaga integritas dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan dan politik.

## **Evaluasi Dampak Sosial-Ekonomi Praktik Money Politic**

Studi mendalam tentang dampak sosial-ekonomi praktik money politic terhadap masyarakat dan ekonomi lokal diperlukan untuk memahami implikasi yang lebih luas dari fenomena ini.

### 1. Pemberdayaan Perempuan dalam Politik

Peningkatan peran dan partisipasi perempuan dalam politik dapat membawa dampak positif dalam mengurangi praktik money politic yang biasanya berkaitan dengan struktur patriarki dan dominasi politik oleh laki-laki.

## 2. Peningkatan Kesadaran Partai Politik

Partai politik memiliki peran kunci dalam mengurangi praktik money politic dengan mengedukasi kader dan anggota partai tentang prinsip-prinsip demokrasi yang bersih dan adil.

## 3. Pengembangan Model Pembangunan Politik Berbasis Integritas

Pengembangan model pembangunan politik yang berbasis pada integritas dan transparansi dapat menjadi landasan untuk mewujudkan sistem politik yang lebih sehat dan representatif.

### **Evaluasi Terhadap Pengaruh Globalisasi**

Globalisasi dan hubungan internasional dapat mempengaruhi dinamika money politic dengan memperluas sumber daya dan pengaruh yang dapat dimanfaatkan oleh aktor-aktor politik. Pengelolaan konflik politik dan penguatan persatuan nasional menjadi penting dalam konteks mengatasi money politic yang dapat memperuncing polarisasi sosial dan politik.

### **Peran Pendidikan Kewarganegaraan**

Pendidikan kewarganegaraan memainkan peran penting dalam mengatasi tantangan money politic di Indonesia. Dengan pendidikan yang tepat, masyarakat dapat dipersiapkan untuk menjadi pemilih yang cerdas dan kritis. Berikut ini adalah bagaimana pendidikan kewarganegaraan dapat terkait dengan upaya mengatasi money politic:

#### 1. Pendidikan Kewarganegaraan sebagai Solusi

Pendidikan kewarganegaraan bertujuan untuk meningkatkan kesadaran politik dan pemahaman akan nilai-nilai demokrasi. Melalui kurikulum yang relevan, siswa dapat mempelajari pentingnya partisipasi aktif dalam proses politik yang bersih dan adil. Mereka diajarkan untuk memilih berdasarkan pada platform kebijakan dan integritas kandidat, bukan atas dasar imbalan finansial atau materi lainnya.

#### 2. Mempromosikan Etika Politik yang Baik

Pendidikan kewarganegaraan juga mendorong promosi etika politik yang baik. Siswa diajarkan tentang prinsip-prinsip moral dalam politik, termasuk kejujuran, transparansi, dan akuntabilitas. Mereka memahami bahwa money politic bertentangan dengan nilai-nilai ini dan dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap sistem politik.

#### 3. Membangun Kesadaran akan Hak dan Kewajiban Warga Negara

Pendidikan kewarganegaraan membantu siswa untuk memahami hak dan kewajiban mereka sebagai warga negara. Mereka diajarkan tentang tanggung jawab untuk memilih berdasarkan informasi yang baik dan pengetahuan yang mendalam, serta hak untuk menolak tawaran atau pengaruh yang melanggar aturan demokrasi.

#### 4. Mengembangkan Kemampuan Analisis dan Kritis

Melalui pendidikan kewarganegaraan, siswa dilatih untuk mengembangkan kemampuan analisis yang kritis terhadap informasi politik dan kampanye. Mereka belajar untuk menilai keabsahan klaim dan janji politik, serta mengenali manipulasi atau praktik yang merugikan demokrasi seperti money politic.

#### 5. Mendorong Partisipasi Aktif dalam Politik

Pendidikan kewarganegaraan tidak hanya mengajarkan tentang teori politik, tetapi juga mendorong partisipasi aktif dalam kehidupan politik. Siswa didorong untuk terlibat dalam forum-forum diskusi, pemilihan ketua kelas atau sekolah, dan simulasi pemilihan umum untuk mengalami proses demokrasi secara langsung.

#### 6. Kolaborasi dengan Lembaga Pendidikan dan Masyarakat

Pendidikan kewarganegaraan dapat bekerja sama dengan lembaga pendidikan dan masyarakat untuk menyelenggarakan program-program yang memperkuat pemahaman tentang demokrasi dan bahaya money politic. Kerjasama dengan lembaga non-pemerintah, media, dan pemangku kepentingan lainnya dapat memperluas jangkauan dan efektivitas pendidikan ini.

#### 7. Evaluasi dan Pengembangan Kurikulum yang Relevan

Pemerintah dan lembaga pendidikan perlu terus melakukan evaluasi terhadap kurikulum pendidikan kewarganegaraan untuk memastikan relevansinya dalam menghadapi tantangan kontemporer seperti money politic. Pengembangan materi yang sesuai dengan perkembangan teknologi dan dinamika politik lokal juga penting untuk mempertahankan efektivitas pendidikan ini.

#### 8. Penanaman Nilai-Nilai Demokrasi Sejak Dini

Pendidikan kewarganegaraan dapat dimulai sejak dini, mulai dari tingkat pendidikan dasar. Dengan demikian, nilai-nilai demokrasi dan integritas politik dapat tertanam kuat dalam budaya dan perilaku siswa sejak usia dini, sehingga mereka dapat tumbuh sebagai warga negara yang sadar akan pentingnya menjaga demokrasi dari pengaruh negatif seperti money politic.

#### 9. Inovasi dalam Metode Pembelajaran

Pendidikan kewarganegaraan perlu terus mengembangkan inovasi dalam metode pembelajaran yang menarik dan relevan bagi generasi muda. Penggunaan teknologi digital, simulasi interaktif, dan pengalaman belajar langsung di lapangan politik dapat meningkatkan efektivitas pendidikan ini dalam membentuk pemahaman yang mendalam tentang proses politik yang sehat.

#### 10. Mendukung Pengawasan dan Keterbukaan

Melalui pendidikan kewarganegaraan, masyarakat dibekali dengan pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk menjadi pengawas yang efektif terhadap proses politik, termasuk pemantauan terhadap praktik money politic. Mereka didorong untuk aktif mengawasi dan melaporkan pelanggaran terhadap aturan demokrasi kepada otoritas yang berwenang.

### **KESIMPULAN**

Pentingnya mengatasi money politic sebagai langkah krusial dalam mempertahankan integritas demokrasi di Indonesia, sebuah negara yang kaya akan keberagaman suku, budaya, bahasa, dan adat istiadat. Money politic tidak hanya mengancam proses pemilihan umum dengan merusak integritasnya, tetapi juga mempengaruhi kualitas representasi politik dan keadilan dalam sistem politik.

Indonesia sebagai negara dengan sistem politik Demokrasi Pancasila berusaha untuk menyatukan pluralitasnya melalui partisipasi warga negara dalam proses politik. Namun, tantangan money politic yang melanggar aturan hukum dan mengarah pada pemilihan berbasis imbalan materi, terus menjadi ancaman serius. Fenomena ini memerlukan solusi holistik yang melibatkan berbagai pihak, mulai dari penguatan regulasi hukum, pemberdayaan masyarakat sipil, hingga reformasi pendidikan politik.

Penelitian dan analisis mendalam terhadap praktik money politic, seperti yang dilakukan di Medan Tembung, menunjukkan betapa pentingnya pemahaman akan pola penggunaannya dan dampaknya terhadap dinamika politik lokal. Evaluasi terhadap regulasi pemilu dan kebijakan publik, serta penguatan lembaga pengawas seperti KPU dan Bawaslu, menjadi langkah-langkah strategis dalam menangani masalah ini secara efektif.

Pendidikan kewarganegaraan juga dianggap sebagai salah satu solusi utama untuk mengubah paradigma masyarakat terkait pemilihan umum. Melalui pendidikan yang tepat, masyarakat dapat dipersiapkan untuk menjadi pemilih yang cerdas, kritis, dan bertanggung jawab. Mereka dilatih untuk memilih berdasarkan informasi yang objektif dan prinsip-prinsip demokrasi yang bersih, sehingga mengurangi daya tarik money politic sebagai strategi politik.

Upaya bersama dari berbagai sektor dalam mengatasi money politic tidak hanya penting untuk memastikan integritas demokrasi saat ini, tetapi juga untuk membentuk masa depan politik yang lebih transparan, adil, dan berkelanjutan bagi Indonesia. Langkah-langkah konkret dalam memperkuat pendidikan kewarganegaraan, penegakan hukum yang tegas, serta partisipasi aktif masyarakat sipil, akan menjadi kunci dalam mengatasi tantangan ini secara efektif dan berkelanjutan.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Aspinall, Edward, and Mietzner, Marcus (eds.). *Problems of Democratisation in Indonesia: Elections, Institutions and Society*. Singapore: Institute of Southeast Asian Studies, 2010.
- Buehler, Michael. *The Politics of Accountability in Southeast Asia: The Dominance of Moral Ideologies*. Oxford University Press, 2014.
- Darmawan R. (2017). Politik Uang dalam Pemilihan Umum Legislatif di Indonesia. *Jurnal Politik Indonesia*, 4(1), 56-71.
- Hadiz, Vedi R., and Daniel Dhakidae. *Social Science and Power in Indonesia*. Equinox Publishing, 2005.
- Jatmiko A. (2019). Money Politics in Local Elections in Indonesia: A Case Study of Yogyakarta City. *Jurnal Kajian Politik*, 7(2), 134-150.
- Kusumo B. (2018). Pengaruh Politik Uang terhadap Prosedur Pemilihan Umum di Indonesia. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 21(2), 178-195.
- Mietzner, Marcus. *Money, Power, and Ideology: Political Parties in Post-Authoritarian Indonesia*. Singapore: NUS Press, 2013.
- Prasojo E. (2020). Money Politics in the Local Election in Indonesia: Case Study of Bandung City. *Jurnal Penelitian Politik*, 17(2), 123-140.
- Setiawan F. (2020). The Influence of Money Politics on Legislative Election Results: A Case Study in East Java Province. *Jurnal Kajian Politik*, 8(1), 45-60.
- Susanto A. (2019). Politik Uang dalam Pemilihan Kepala Daerah di Indonesia: Studi Kasus Pemilihan Gubernur DKI Jakarta 2017. *Jurnal Studi Pemilu*, 6(2), 89-106.
- Tomsa, Dirk, and Andreas Ufen (eds.). *Party Politics in Southeast Asia: Clientelism and Electoral Competition in Indonesia, Thailand and the Philippines*. Routledge, 2013.
- Tomsa, Dirk. *Party Politics and Democratization in Indonesia: Golkar in the Post-Suharto Era*. Routledge, 2014.
- Utomo P. (2018). Dampak Praktik Money Politics terhadap Kualitas Pemilihan Umum di Indonesia. *Jurnal Ilmu Politik Indonesia*, 5(1), 45-60.
- Wibowo H. (2019). Analisis Politik Uang dalam Pemilihan Umum di Indonesia: Kasus Pemilihan Umum Presiden 2019. *Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintahan*, 6(1), 23-40.
- Yudhoyono S. (2018). Dampak Politik Uang terhadap Legitimasi Demokrasi di Indonesia. *Jurnal Politik Muda*, 3(2), 78-93.